

Dua Bulan, Ribuan Batang Merbau Ditebang Ilegal

Upaya sejumlah lembaga di Papua, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, belum maksimal mencegah penyalahgunaan sumber daya alam di tanah Papua.

SURABAYA, KOMPAS — Belum lagi penyelundupan 57 kontainer kayu merbau ilegal di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, dari Papua, 6 Januari 2019, terungkap, penyelundupan serupa terjadi lagi. Kali ini 199 kontainer di Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur.

Temuan itu menambah total 384 kontainer serupa yang ditahan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepanjang Desember 2018 hingga Januari 2019.

Perhitungan kasarnya, 1 pohon merbau siap tebang (diameter lebih dari 30 sentimeter) menghasilkan 4-5 meter kubik. Jika satu kontainer rata-rata memuat 20 meter kubik, total

kayu sitaan diperkirakan lebih dari 7.000 meter kubik.

Artinya, ada lebih dari 1.500 pohon merbau ditebang. Jenis kayu ini tahan air sehingga sering digunakan sebagai fondasi dermaga kayu ataupun perahu.

Dari operasi ini, penegak hukum KLHK di Sorong, Papua Barat dan Jayapura, Papua, memeriksa 17 perusahaan sumber kayu. Berdasarkan data KLHK, temuan ini merupakan fenomena gunung es.

Dalam ekspose penyitaan terbaru 199 kontainer di Teluk Lamong, Rabu (16/), kayu-kayu tampak basah mengeluarkan getah. Aroma merbau yang khas menyeruak saat kontainer dibuka.

Di dalamnya, papan-papan

kayu dipotong kasar menumpuk. Tebalnya bervariasi, berkisar 5-15 sentimeter. Hal itu menunjukkan kayu diolah di dalam hutan.

Di Surabaya, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, penebangan ilegal ini diketahui dari ketidaksesuaian dokumen dengan isi kontainer. Penyitaan didasarkan pada audit kepatuhan terkait penyelamatan sumber daya alam Papua terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan hasil kayu-hutan alam (IUPHHK-HA).

Dari audit terungkap rencana penebangan kayu jauh lebih kecil dibandingkan data manifest pengiriman kayu. Nilai kayu-kayu ilegal ini diperkirakan Rp 120 miliar.

"Tidak hanya merugikan negara, pembalakan liar ini juga mengancam kehidupan warga karena fungsi hutan sebagai sumber makanan, obat, dan penangkap air hilang. Banjir terjadi saat musim hujan, kekeringan saat kemarau," ujarnya.

Citra industri mebel

Bagi dunia usaha, penyelundupan ini merusak citra industri mebel dan kerajinan di Jawa Timur dan sekitarnya. Penegak hukum diminta tegas.

Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Jawa Timur Nur Cahyudi mengatakan, pihaknya mendorong pengungkapan kasus pengiriman kayu merbau ilegal ke Surabaya. Penindakan juga ha-

rus kepada perusahaan penerima kayu ilegal tersebut.

"Pengungkapan kasus harus tuntas untuk meyakinkan konsumen di dalam dan luar negeri bahwa industri kayu di Jatim tidak menggunakan kayu curian, tetapi kayu yang jelas asal usulnya," kata Nur.

Di Jayapura, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil pihak KLHK, pekan depan. Mereka ingin tahu hasil ekspose gelar perkara dan upaya penegakan hukum pengiriman kayu ilegal dari Papua.

Menurut Koordinator Tim Sumber Daya Alam Direktorat Litbang KPK Dian Patria, pencegahan penyalahgunaan SDA Papua oleh KPK bersama sejumlah instansi lain tak berjalan maksimal. (SYA/ICH/FLO)